

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Skandal praktik akuntansi telah terjadi di berbagai negara seperti kasus *Enron* dan *WorldCom* di Amerika Serikat, *HIH Insurance* dan *One.Tel* di Australia.<sup>1</sup> Skandal akuntansi yang terjadi berkaitan dengan penyampaian informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan yang penting bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan juga merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik.<sup>2</sup> Salah satu elemen dari informasi laporan keuangan yang menarik perhatian adalah informasi mengenai laba perusahaan.

Laporan laba yang dihasilkan manajer perusahaan, tidak terlepas dari proses pemilihan kebijakan akuntansi untuk suatu tujuan tertentu yang dikenal dengan istilah *earnings management*.<sup>3</sup> Adanya kecenderungan manajer melakukan perilaku oportunistik dalam bentuk *earnings management*. Perilaku oportunistik manajer timbul karena adanya perbedaan konflik

---

<sup>1</sup>Mas Achmad Damiri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hal. 7.

<sup>2</sup>Belkaoui, Ahmed R. *Accounting Theory*.(Thomson Learning, 2010)

<sup>3</sup>Scott, W.R., *Financial Accounting Theory*, (Second Edition, Scarborough, Ontario: Prentice Hall, Canada, Inc. 2008)

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.<sup>4</sup> Watts dan Zimmerman berpendapat bahwa adanya motivasi lain yang memicu manajer melakukan *earnings management* untuk mempublikasikan pengungkapan yang lebih informatif.<sup>5</sup> Healy dan Wahlen menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer perusahaan menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi yang dapat mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan para pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.<sup>6</sup> Fernandez dan Ferreira berpendapat bahwa hal ini menyebabkan investor menjadi tidak percaya akan kualitas laporan keuangan yang disajikan telah meningkatkan ketertarikan mengenai faktor-faktor penentu manajemen laba.<sup>7</sup>

Purnomo dan Pratiwi menyatakan bahwa berdasarkan laporan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terdapat 25 kasus pelanggaran pasar modal yang terjadi selama tahun 2002 sampai dengan Maret 2003. Dari 25 kasus pelanggaran tersebut terdapat 13 kasus yang berkaitan dengan benturan kepentingan dan keterbukaan informasi. Selain itu pada tahun 1998

---

<sup>4</sup>Jensen, M., & Meckling, W., "Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownershipstructure". *Journal of Financial Economics*, 305-360. 1976, [http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X) (diakses 04 Agustus 2014)

<sup>5</sup>Watts, R., & Zimmerman, J. L., *Positive Accounting Theory*, (Englewood-Cliffs, N. J.: Prentice Hall, Inc. 2006)

<sup>6</sup> Welvin I Guna dan Arleen Herawaty, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba". (*Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol 12, 1 April 2010) hh 53-68

<sup>7</sup> Fernandes, Nuno dan Ferreira, Miguel A. (2007). "The Evolution of Earnings Management and Firm Valuation : A Cross-Country Analysis". (*Working Paper*, 22 Oktober 2007)

sampai 2001 tercatat banyak terjadi skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik dengan melibatkan persoalan laporan keuangan (*financial reporting*) yang diterbitkan. Beberapa kasus diantaranya terjadi pada PT. Lippo Tbk. dan PT. Kimia Farma Tbk.

Sedangkan menurut hasil studi komparatif internasional yang dilakukan oleh Leuz mengenai manajemen laba dan proteksi investor (periode pengamatan tahun 1990 sampai dengan 1999) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada tingkat menengah urutan ke 15 dari sampel 31 negara. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang sama-sama ikut terpilih sebagai sampel seperti Malaysia, Filipina dan Thailand, maka Indonesia adalah negara yang paling tinggi tingkat manajemen labanya.

Kasus di atas menunjukkan bahwa praktek manajemen laba dalam pelaporan keuangan bukanlah suatu hal yang baru. Kejamnya pasar dan tingginya tingkat persaingan, pada akhirnya telah menimbulkan suatu dorongan atau tekanan pada perusahaan-perusahaan efek untuk berlomba-lomba menunjukkan kualitas dan kinerja yang baik, tidak peduli apakah cara yang digunakan tersebut diperbolehkan atau tidak.<sup>8</sup>

Trueman dan Titman berpendapat bahwa perilaku manajer yang melakukan manajemen laba dapat diminimalisir dengan menerapkan mekanisme *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah

---

<sup>8</sup> Budi S. Purnomo dan Puji Pratiwi, "Pengaruh Earning Power terhadap Praktek Manajemen Laba (*Earning Management*) (Suatu Kasus pada Perusahaan *Go Public* Sektor Manufaktur)", (*Jurnal Media Ekonomi* Vol. 14 No. 1, April 2009), hh 2-3

mekanisme yang digunakan dalam membatasi timbulnya masalah asimetri informasi yang seringkali mendorong terjadinya *earnings management*.<sup>9</sup> Shleifer dan Vishny berpendapat bahwa mekanisme *good corporate governance* dapat dijalankan dengan adanya aktivitas pemantauan dewan direksi dan komite. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberi keuntungan bagi mereka dan yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan dan menginvestasikan dana perusahaan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang ditanam investor dan bagaimana investor mengendalikan para manajer.<sup>10</sup>

Krisis pada tahun 1997 di Indonesia dan disertai dengan buruknya implementasi tata kelola pemerintahan dan setiap perusahaan saat itu, menjadikan perekonomian Indonesia terpuruk. Hal tersebut telah memicu kesadaran terhadap tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta untuk memulai dan mengimplementasikannya. Untuk memulai dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) terlebih khusus prinsip-prinsipnya yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF) menjadi suatu *issue* yang

---

<sup>9</sup>Trueman, B., and S. Titman, "An Explanation for Accounting Income Smoothing", (*Journal of Accounting Research* 26, supplement, 1998) hh 127-139.

<sup>10</sup>Shleifer, Andrei. dan Vishny, R.W.. "Management ownership and market valuation: An empirical analysis". (*Journal of Financial Economics* 20, 1988) hh 293-315

mengemuka untuk diperbincangkan, dan merupakan sebagai alat atau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memberikan implikasi positif bagi setiap perusahaan dan pemerintah. Kinerja hingga prestasi yang mengagumkan dan membanggakan dapat diraih atau dicapai baik secara Nasional dan hingga pada taraf Internasional. Terdapat beberapa lembaga-lembaga tertentu yang bersifat tidak terikat dan tidak memaksa (*ethical driven*) untuk memberikan penilaian, peringkat, penghargaan dan melakukan penelitian kepada setiap perusahaan atau setiap negara yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau karena implikasi dari implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Fortune 500, *Corporate Governance Conference and Award (IICD)*, *Asian Development Bank*, *Asian Corporate Governance Association (ACGA)*, dan *Asean Corporate Governance Score Card*.

Kesadaran dan keseriusan terhadap upaya pemerataan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Pembuatan serta dengan mengeluarkan peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah solusi yang bersifat mengikat dan memaksa (*regulatory driven*) bagi setiap perusahaan berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT), baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan

swasta. Peraturan atau regulasi tersebut, antara lain adalah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Mandatory peraturan-peraturan tersebut diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.

Hingga saat ini penilaian penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan sehingga membutuhkan waktu dan komitmen yang lebih serius, agar pencapaian dan implementasi dapat dirasakan secara merata serta memberikan implikasi yang positif. Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Nilai Penerapan *Corporate Governance* (CG) Negara ASEAN**  
**Tahun 2012-2013**

No.	Negara	% (Rata-
1	Thailand	67.7%
2	Malaysia	62.3%
3	Viet Nam	61.9%
4	Singapore	56.1%
5	Filipina	48.9%
6	Indonesia	43.4%

Sumber : Asian Development Bank (2013)<sup>11</sup>

Tidak adanya perhatian yang serius dan maksimal terhadap implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, mengakibatkan Indonesia menjadi negara tertinggal dibandingkan antar sesama negara ASEAN tersebut. Hal ini perlu menjadi suatu perhatian serius bagi setiap

---

<sup>11</sup> Asian Development Bank. *ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Reports and Assessments 2012-2013*. (Philipina: ADB, 2013)

perusahaan dan negara dalam menanggapi dan menyikapi persaingan ekonomi yang ketat.

Khususnya tahun 2015 merupakan tahun Indonesia berperan dan ikut serta dalam kerjasama Internasional. *ASEAN Economic Community* (AEC) adalah bentuk integrasi ekonomi kawasan ASEAN, sehingga Indonesia perlu melakukan kajian dan persiapan yang matang bagi negara dan setiap perusahaan untuk dapat menghadapi dan menyikapi pelaksanaan *ASEAN Economic*.

Penelitian ini, selain terfokus pada Bursa Efek Indonesia, juga memusatkan perhatian pada Bursa Efek Malaysia dan Bursa Efek Filipina dengan pertimbangan bahwa baik Malaysia maupun Filipina sama-sama merupakan dua negara terdekat dan berbatasan langsung dengan Indonesia sehingga menurut kaidah integrasi ekonomi diperkirakan bahwa kejadian ekonomi dan keuangan yang terjadi di salah satu negara akan merambat dan mempengaruhi kondisi ekonomi dan keuangan kedua negara lainnya. Oleh sebab itu penelitian ini membahas kemungkinan terjadinya *fraud* di Indonesia, Malaysia dan Philipina.

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi

pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik, perusahaan perlu melakukan *penunjukkan* dewan komisaris independen dan komite audit. Palestin menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Hal ini disebabkan karena komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya.<sup>12</sup>

*Chtourou et al.* berpendapat bahwa dewan komisaris yang independen (karena berasal dari luar perusahaan diasumsikan lebih netral) secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan

---

<sup>12</sup> Palestin, S. H., , "Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba" (Studi Empiris di PT BEI, 2006)

komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.<sup>13</sup>

Menurut Peasnell *et al.* keberadaan komisaris independen efektif untuk membatasi pihak manajemen dalam melakukan *earnings management*. Komisaris independen yang memiliki pengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting dalam pencegahan kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba.<sup>14</sup> Namun, Lai menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen yang tinggi tidak berhubungan dengan penurunan tingkat manajemen laba. Dalam penelitian ini keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan adalah penting, namun penambahan jumlah komisaris independen tidak efektif menurunkan tingkat manajemen laba.<sup>15</sup>

Faktor lain yang dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan *agent principal* adalah dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan manajer dan pemegang saham.<sup>16</sup> Besarnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajerial perusahaan akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh manajer, karena keputusan tersebut nantinya akan

---

<sup>13</sup> Chtourou, S. M., Bedard, J., and Courteau, L. *Corporate Governance and Earnings Management. Working Paper.* (Quebec City, Canada: Universite Laval, 2001)

<sup>14</sup> Peasnell, K., Pope, P., and Young, S. *Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?* (Working Paper, Lancaster, U.K: Lancaster University, 2001)

<sup>15</sup> Lai, L.H..*Are Independent Directors Effective in Lowering Earnings Manajement in China.* (A Dissertation. Texas A & M University. 2005) pp. 1-85.

<sup>16</sup>Op Cit Jensen & Meckling, 1976

mempengaruhi posisinya sebagai manajer perusahaan juga sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial akan menambah keyakinan investor bahwa perilaku manajer untuk melakukan tindakan untuk memanipulasi laba dapat diminimalkan. Menurut Ross *et.al.* semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya.<sup>17</sup> Namun, menurut Frank Yu jika pengelolaan yang dilakukan manajemen perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan manajerial yang tinggi akan menambah manajemen laba (kalimat pendapatnya ada di *earnings management* dan *board oversight*).<sup>18</sup> Demsetz berpendapat bahwa struktur kepemilikan manajerial yang tinggi menyebabkan bertambahnya manajemen laba. Kepemilikan manajerial yang tinggi terdapat potensi dimana manajer lebih khawatir dengan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pemegang saham, di mana dapat menurunkan nilai perusahaan.<sup>19</sup>

Selain kepemilikan manajerial, adanya kompensasi berupa bonus dapat digunakan untuk menyetarakan kepentingan manajer dan pemegang saham. Berdasarkan hasil penelitian yang meneliti hubungan bonus dengan pemilihan kebijakan akuntansi. Demsetz menemukan bahwa manajer di

---

<sup>17</sup> Ross, A. Stephen et al, *Pengantar Keuangan Perusahaan Corporate Finance Fundamentals*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

<sup>18</sup> Yu, Frank. *Corporate Governance and Earnings Management*. (Working Paper, 2006.)

<sup>19</sup> Demsetz, and B. Villalonga, "Ownership Structure and Corporate Performance". (*Journal of Corporate Finance* 7, Vol. 7, Issue 3, September, 2001) hh 209-233

Amerika menggunakan manajemen laba ketika adanya bonus untuk memaksimalkan bonus yang diterima.<sup>20</sup>

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa insentif primer untuk *earnings management* adalah kompensasi. Manajer menggunakan *discretionary accounting accruals* untuk sampai pada level *earnings* yang memaksimalkan bonus mereka. Ini bisa menciptakan *income increasing accruals* untuk memenuhi *benchmark* atau *income decreasing accruals* ketika manajer memilih untuk melestarikan *earning* 'kelebihan' untuk periode pelaporan berikutnya yang lebih ramping.<sup>21</sup> Selain itu, manajer bisa terlibat dalam *income decreasing accruals* untuk menciptakan halangan atau *benchmark* lebih rendah untuk periode berikutnya.

Industri manufaktur dan lembaga keuangan adalah industri yang paling besar yang mengedepankan kejujuran dan prudensi yang seharusnya dapat menjadi contoh *corporate governance* bagi sektor industri lainnya. Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat, persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Das, S., P.K. Shroff, dan H. Zhang. 2009. Quarterly earnings patterns and earnings management. (*Contemporary Accounting Research* 26 (3)) hh 797-831.

Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank, baik yang BUMN, BUMD maupun BUMS sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan yang kurang baik dapat menimbulkan penyimpangan di kalangan pengelola perusahaan, direksi atau manajemen yang dilakukan oleh pemegang saham maupun karyawan. Penyimpangan terjadi karena adanya kepentingan pribadi tingkat atas dalam mengelola perusahaan yang memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Maraknya kasus ketidakstabilan dunia bisnis menggambarkan lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (yang selanjutnya disingkat GCG) sehingga menimbulkan masalah yang menjadi sorotan para bankir, pemegang saham, *stakeholder* dan khususnya pihak pemerintah seperti terjadinya kasus pembobolan L/C pada Bank BNI, ekspor pasir dan minyak ke beberapa negara Afrika yang ternyata fiktif, kasus tersebut menggambarkan direksi dan komisaris tidak bertanggungjawab dengan mengabaikan prinsip *responsibility* dan *accountability*.

Kasus pelanggaran prinsip GCG tidak hanya terjadi pada BNI dan Bank Lippo tetapi juga terjadi pada Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon dengan kasus *Head Teller*, Bank BII, bangkrutnya Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali dengan kasus *fraud* yang dilakukan oleh para direksi dan komisaris, Bank Global Tbk dan Bank Century Tbk dengan memperjualbelikan obligasi fiktif serta Bank bjb dengan masalah kucuran dana untuk proyek fiktif. Skandal kasus-kasus di atas terutama di dunia perbankan masih

banyak terjadi hal ini karena lemahnya sistem pengendalian intern yang dilakukan auditor internal dalam perusahaan dan pengelolaan manajemen perusahaan yang kurang baik dari tingkat pelaksanaan audit internal, manajemen, komite, maupun direksi perusahaan yang dapat merugikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Bank dan menghambat perwujudan *Good Corporate Governance*.

Dari data Bank Indonesia (BI) tahun 2008 mengungkapkan bahwa 69% bank dalam negeri masih melanggar aturan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), pelanggaran yang sering terjadi terutama pada masalah dewan komisaris yang mencapai 53% kasus.

Menurut *Transparency International* pada tahun 2001 Indonesia menempati urutan CPI terendah dengan nilai 1,9, dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya yang mempunyai indeks nilai di atas 3, pada tahun 2002 Indonesia mempunyai indeks 2,2 jauh tertinggal dari skor negara Filipina (2,6), Thailand (3,1), Malaysia (4,9) dan Singapura (9,1), tahun 2003 indeks CPI Indonesia masih tetap pada nilai 2, sedangkan negara Filipina (2,5), Thailand (3,4), Malaysia (5,5) dan Singapura (9,4). Tahun 2004 sampai tahun 2008 negara Indonesia mengalami peningkatan skor indeks CPI maka menggambarkan semakin baik GCG di Indonesia, dibandingkan dengan negara Filipina dan Thailand yang semakin menurun skor indeksnya, sedangkan skor indeks negara Malaysia dan Singapura tidak mengalami perubahan yang besar.

Selain itu, pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke 111 dari 179 negara dan peringkat ke 20 dari 25 Negara Asia Pasifik dengan predikat tingkat negara korupsi. (Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “Political & Economic Risk Consultancy” (PERC) yang berbasis di Hong Kong).

Gambaran lemahnya penerapan *corporate governance* di Indonesia dikarenakan kurangnya sikap profesionalisme personel yang terkait di dalam perusahaan yang melaksanakan *corporate governance*, dalam pelaksanaannya hanya karena dorongan regulasi dan takut terkena sanksi yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan belum mampu mencerminkan transparansi dan akuntabilitas secara murni dan konsisten kepada *stakeholder*. Hal lain yang dapat menyebabkan lemahnya penerapan GCG adalah adanya kegagalan legal audit baik bagi external auditor maupun internal auditor dalam mendeteksi terjadinya *fraud yang* terjadi dalam perusahaan.

Walaupun dampak negatif tersebut dapat diperkecil, namun resiko bisnis tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan. Maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang benar-benar mengatur tentang penerapan konsep GCG bagi bank umum yaitu peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Penerapan peraturan yang baik dapat memberikan

perlindungan yang efektif kepada *minority shareholders* dan kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi:

1. Ada kecenderungan manajer melakukan perilaku oportunistik dalam bentuk *earnings management* karena adanya perbedaan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham
2. Penambahan jumlah komisaris independen tidak efektif menurunkan tingkat manajemen laba
3. Kepemilikan manajerial yang tinggi terdapat potensi dimana manajer lebih khawatir dengan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pemegang saham, dimana dapat menurunkan nilai perusahaan
4. Ada indikasi bahwa investor tidak percaya akan kualitas laporan keuangan yang disajikan telah meningkatkan ketertarikan mengenai faktor-faktor penentu manajemen
5. Terdapat indikasi bahwa *income increasing accruals* bisa tercipta untuk memenuhi *benchmark* atau *income decreasing accruals*

ketika manajer memilih untuk melestarikan earning 'kelebihan' untuk periode pelaporan berikutnya yang lebih ramping

6. Terdapat indikasi bahwa manajer bisa terlibat dalam *income decreasing accruals* untuk menciptakan halangan atau *benchmark* lebih rendah untuk periode berikutnya

### **C. Pembatasan Masalah**

Ada banyak faktor yang mempengaruhi *earnings management*, seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio *leverage*, dan rasio aktivitas; *good corporate governance*; kepemilikan manajerial; dan *bonus plan*. Dalam penelitian ini, pembahasan lebih diarahkan pada faktor-faktor yang dianggap paling berpengaruh atau dominan terhadap *earnings management* berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan analisa awal penulis.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, keberadaan/proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial dan *bonus plan* berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*?

2. Apakah ada perbedaan proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial, *bonus plan* dan *earnings management* antara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia – Bursa Efek Malaysia?
3. Apakah ada perbedaan proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial, *bonus plan* dan *earnings management* antara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia–Bursa Efek Filipina?
4. Apakah ada perbedaan proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial, *bonus plan* dan *earnings management* antara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia–Bursa Efek Filipina?

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan dari studi penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif rujukan penelitian tentang *earnings management* dalam kaitannya dengan

pelaksanaan *good corporate goveranance*, kepemilikan manajerial dan bonus plan.

2. Bagi perusahaan

Perusahaan dapat menerapkan dan mengaplikasikan *good corporate governance* dalam perusahaan agar dapat memaksimalkan penggunaan manajemen laba dalam mencapai kualitas informasi keuangan yang andal

3. Bagi investor

Investor dapat menambah pengetahuan dan informasi sebelum mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba.